

## Data UIP

Nama rastra bayu prasaja  
Kontak 087755441072  
Email rastrabayu27@gmail.com

## Informasi Utama

# Ini Lo Pak De Inovasi Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah

Tanggal Inisiatif 2014-06-19  
Kategori Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan  
Kolaboratif dalam Era Informasi  
Kriteria  
Memperkenalkan Pendekatan Baru  
Pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi  
Meningkatkan efektivitas pelayanan publik

# Ini Lo Pak De Inovasi Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah

Ringkasan singkat

Mengapa pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah? Hal tersebut tidak lain karena semangat reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah juga dikarenakan masih banyaknya permasalahan dalam pengelolaannya. Beberapa permasalahan tersebut yaitu kurangnya efektifitas penyusunan APBD, kebocoran penyelenggaraan keuangan, penyelesaian aset, pengadaan barang dan Jasa, dan daya serap anggaran yang kecil, selain itu juga diperkuat dengan kurangnya akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Permasalahan tersebut pada dasarnya berkaitan antara lain dengan permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mampu dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Seiring dengan Misi Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, yakni Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (UPT-LPKD) pada BPKAD Provinsi Jawa Timur. UPT-LPKD merupakan inovasi baru dan lembaga pertama di Indonesia yang bergerak dibidang *Capacity Building* PKD, pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Sedangkan **Dampak yang dihasilkan** secara spesifik dalam Pengembangan UPT-LPKD adalah Mewujudkan Provinsi Jawa Timur menuju tata kelola yang baik dan Mewujudkan implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan realistis untuk meningkatkan mutu program dan kegiatan yang mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih baik.

Kedepan, UPT LPKD dapat mencetak SDM yang profesional dalam memahami PKD melalui "**Ini Lo Pak De (Inovasi Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah)**" Kegiatan yang dilakukan pada UPT LPKD meliputi sejumlah pelatihan teknis PKD mulai dari perencanaan hingga pelaporan, pelayanan pendampingan melalui Klinik Center, Diskusi isu-isu PKD, Pengembangan Database serta Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi PKD dan Analisis hasil kajian. Yang menjadi unggulan dalam Pelatihan Teknis PKD adalah materi yang disajikan mudah dipahami dengan Tutor yang berkompeten serta pembelajaran secara *E-Learning* yang berasal dari akademisi, praktisi maupun dari SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berbagai kegiatan ini disiapkan dengan harapan untuk mengurangi permasalahan dalam penyelenggaraan keuangan negara dan daerah dan output yang diharapkan dapat optimal serta tepat sasaran.

## Proposal

### Analisis Masalah

**Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini?**

Mengapa pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah?, karena semangat reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) dan masih banyaknya **permasalahan** dalam pengelolaannya yaitu:

1. Kurangnya efektifitas dalam penyusunan APBD;
2. Kebocoran penyelenggaraan keuangan;

### 3. Penyelesaian aset antara lain :

- Aset berupa tanah yang belum bersertifikat dan dikuasai oleh pihak lain sehingga diperlukan pendataan ulang, survey lokasi, serta melibatkan *stakeholder* yang berwenang, hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya;
  - Aset kendaraan dinas operasional, dokumennya banyak yang tidak lengkap, seperti hibah dari pemerintah pusat/sumbangan luar negeri/swadaya masyarakat, sehingga diperlukan survey pendataan ulang dan melakukan penilaian ekonomis terhadap aset tersebut, hal ini membutuhkan waktu yang cukup dalam penyelesaiannya;
4. Pengadaan barang dan jasa, berdasarkan data KPK, “bahwa sebagian besar kasus KKN yang dilaporkan mempunyai hubungan dengan proses pengadaan barang/jasa baik di instansi pemerintah maupun swasta”;
5. Daya serap anggaran yang rendah;
6. Kurang mempunyai SDM dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Di era desentralisasi permasalahan PKD adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, sementara dana yang dikelola oleh pemerintah daerah selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menuntut adanya pengelolaan keuangan yang handal dan kompeten dari level perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban agar tercipta pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada LKPD TA. 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian yang sebelumnya mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut. Salah satu permasalahannya adalah masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengabsorpsi dan mengadopsi berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan, terutama tentang mekanisme dan tata laksana APBD sehingga perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM dibidang Perencanaan Anggaran, Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan secara reguler;
- b. Perlu adanya Pelatihan Teknis sesuai perkembangan kebijakan dan regulasi dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas personal tentang PKD;
- c. Perlu adanya perencanaan yang lebih memprioritaskan kepentingan pelayanan masyarakat dan layanan publik yang sangat mendesak.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat terobosan baru dengan mendirikan *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah* sebagai solusi mengatasi permasalahan dimaksud.

Keberadaan UPT-LPKD ini sangat penting mengingat terbatasnya kemampuan SDM Pengelola Keuangan Daerah yang mengelola Anggaran Belanja sebesar Rp. 20.957.472.614.798,70 pada APBD TA 2014, hal ini tidak sebanding dengan jumlah Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran	:	47 orang
2. Kuasa Pengguna Anggaran	:	399 orang
3. Bendahara Penerimaan	:	32 orang
4. Bendahara Penerimaan Pembantu	:	182 orang
5. Bendahara Pengeluaran	:	53 orang

6. Bendahara Pengeluaran Pembantu	:	399 orang
7. Pejabat Pengelola Keuangan-SKPD	:	94 orang
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	199 orang
9. Pengurus Dan Juru Bayar Gaji	:	104 orang
10. Fungsi Akuntansi	:	74 orang
11. Fungsi Verifikasi	:	66 orang
12. Fungsi Perbendaharaan	:	33 orang
13. Fungsi Pengurus Barang	:	135 orang
14. Operator SIPPD	:	83 orang
15. Operator SMEP	:	53 orang

Kesemua permasalahan tersebut berkaitan erat dengan permasalahan SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kab/Kota yang kurang mampu dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah.

## Pendekatan Strategis

**Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah memecahkan masalah tersebut?**

Berdasarkan permasalahan tersebut, Gubernur Jawa Timur memerintahkan Sekretaris Daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk membuat suatu terobosan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang keuangan dan akhirnya terbentuklah *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah* (LPKD) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur.

Pengembangan UPT-LPKD terdiri dari 4 (empat) pilar yaitu: Penguatan Kebijakan, *Capacity Building*, Pengembangan *Database* dan Teknologi Informasi, tentunya ada beberapa strategi pelaksanaan dan penerapan yang dilakukan, yaitu meliputi :

**Faktor Internal :** ([uptlpkdjatim.blogspot.co.id](http://uptlpkdjatim.blogspot.co.id))

- a. **Sarana dan Prasarana** berupa gedung di Jl. Sikatan No. 10, Surabaya sebagai tempat pembelajaran yang terintegrasi secara sistem, terdiri dari :
  - Ruang Bromo dan Semeru, untuk Pelatihan Teknis dengan proses pembelajaran berbentuk *e-learning* berkapasitas 40 (empat puluh) orang;
  - Ruang Ijen, untuk praktek-praktek Penyusunan Laporan Keuangan secara utuh;
  - Ruang diskusi Arjuno dan Anjasmoro, untuk Pendampingan Klinik Konsultasi dan Pembahasan Kajian-Kajian Baru;
  - Ruangan auditorium Madakaripura, untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh yang berbasis TI;
  - Ruang *e-library*, merupakan perpustakaan elektronik dan pusat *database* Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Menyediakan fasilitas kamar bagi Tutor dan peserta.
- b. **Komitmen Pelayanan**

- 14 (empat belas) Pegawai UPT-LPKD;
- 2 (dua) personel *frontdesk*;
- 6 (enam) personel *cleaning service*;
- 8 (delapan) personel *security*.

**Faktor Eksternal** : ([uptlpkdjatim.blogspot.co.id](http://uptlpkdjatim.blogspot.co.id))

- a. **Tutor Berkompoten**, UPT-LPKD melakukan kerjasama dengan Akademisi dan Pegawai Negeri yang ada di SKPD Pemprov. Jatim. Kegiatan yang dilakukan untuk menyaring para Tutor melalui ToT (*training of trainer*);
- b. **Modul Berkualitas** secara *e-learning*, yaitu :
  1. **Modul Umum**, sudah disesuaikan dengan Peraturan Perundangan terbaru terkait Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD), diperuntukkan untuk Peserta Pelatihan Teknis yang belum mengetahui PKD secara utuh;
  2. **Modul basic**, diperuntukkan untuk Peserta Pelatihan Teknis yang baru menjabat sebagai Pengelola Keuangan Daerah;
  3. **Modul intermediate** diperuntukkan untuk Peserta Pelatihan Teknis yang pernah menjabat sebagai Pengelola Keuangan Daerah.
- c. **Kajian PKD**, UPT-LPKD melakukan kajian-kajian terkait PKD;
- d. **Pendampingan PKD** (*clinic center*), berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh SKPD di Pemprov Jatim terkait PKD;
- e. **Pelayanan TI**, membangun Blog UPT-LPKD yang berisi tentang informasi mengenai PKD, Opini-opini, Kegiatan UPT-LPKD;
- f. **Pelayanan Database**, berupa informasi PKD yang dapat dipakai sebagai pembelajaran secara elektronik yang didalamnya terdapat :
  - **Menu Regulasi**, berisi tentang Peraturan Perundang-undangan terkait PKD;
  - **Menu Kajian**, berisi tentang hasil kajian-kajian yang telah dilakukan oleh UPT-LPKD;
  - **Menu Magazine**, berisi Buletin UPT-LPKD dan referensi buku terkait PKD;
  - **Menu Data Keuangan**, berisi data keuangan baik APBD Pemprov. Jatim maupun Kabupaten/Kota yang *audited*.
  - **Menu Klinik Konsultasi**, berisi tentang permasalahan dan rekomendasi yang dikonsultasikan pada UPT-LPKD.

**Kelompok sasaran** dari inovasi *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah* ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur ;
3. Lembaga Legislatif ;
4. Lembaga Yudikatif ;
5. Staf Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
6. Staf Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur ;
7. Pengelola Keuangan Desa se-Jawa Timur ;
8. Perguruan Tinggi ;
9. Masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta).

Dengan **tujuan utamanya** adalah :

1. Mencetak Sumber Daya Manusia Aparatur yang terintegrasi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan ;
2. Menyamakan pemahaman pengetahuan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Mencetak Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Mencetak Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat menyusun Laporan Keuangan dengan melakukan pembelajaran praktek pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Mencetak Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat melakukan *transfer knowledge* terkait Pengelolaan Keuangan Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah masing - masing.

### **Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif**

Pendirian Unit Pelaksana Teknis *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah* adalah inovatif original yang **belum diterapkan oleh daerah manapun di Indonesia**, sedangkan **Pendekatan kreatif inovatif** dan **original** yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. **Adanya Modul Berkualitas** yang telah disesuaikan dengan karakteristik Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang berisi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual yaitu :
  1. Modul Umum, diperuntukkan untuk Peserta Pelatihan Teknis yang belum mengetahui Pengelolaan Keuangan Daerah secara utuh;
  2. Modul *basic*, diperuntukkan untuk Peserta Pelatihan Teknis yang baru menjabat sebagai Pengelola Keuangan Daerah;
  3. Modul *intermediate*, diperuntukkan untuk Peserta Pelatihan Teknis yang sudah pernah menjabat sebagai Pengelola Keuangan Daerah.
- b. **Tutor Berkompeten**, dimana Unit Pelaksana Teknis *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah* melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Praktisi dan Pegawai Negeri yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pusat.
- c. **Pelatihan Teknis** dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keuangan **Berbasis Akrual**;
- d. **Pelatihan Teknis secara komprehensif** mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, sehingga peserta mampu menyusun laporan keuangan;
- e. **Proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi** (dilakukan secara elektronik dan visual) dan terintegrasi secara sistem;
- f. **Penyelesaian permasalahan** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (*online*)
- g. **Sarana dan prasarana** pembelajaran yang **representatif**.

## **Pelaksanaan dan Penerapan**

### **Bagaimana strategi ini dilaksanakan?**

Peraturan yang mengatur UPT-LPKD dan menjadi landasan hukum bagi UPT-LPKD adalah Peraturan Gubernur nomor 39 tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Jawa Timur yang merupakan **model solusi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah**. Pengembangan UPT-LPKD melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Peresmian Gedung LPKD pada tanggal 20 Oktober 2014 dilakukan oleh Bapak Gubernur Jawa Timur yang merupakan Titik Nol beroperasinya UPT-LPKD ;
2. Pelantikan Pejabat Struktural guna mengisi struktur organisasi UPT-LPKD, dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2014 , dengan susunan organisasi sebagai berikut :
  - a. Kepala UPT-LPKD ;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Program ;
  - d. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
3. Pembangunan jaringan beserta perangkatnya untuk aplikasi modul (*e-learning*) sebagai metode pembelajaran elektronik, hasil dari pendampingan Universitas Gadjah Mada dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada tanggal 13 Maret 2013 ;
4. Kerjasama dengan Bank Dunia berupa Pendampingan yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Modul Umum, Pembuatan Aplikasi Modul (*e-learning*) serta melakukan ToT dalam 2 (dua) tahap ;
5. Menggandeng *Departement of Foreign Affair and Trade Australia* (DFAT) sebagai tindak lanjut pengembangan UPT-LPKD pada tanggal 13 Juni 2014 yang dihadiri oleh Ibu Jessica Ludwig M. (Direktur AIPD Program) ;
6. Pelaksanaan pendampingan *Tim Australia Indonesia Partnership and Decentralisation* (AIPD) diawali dengan Kunjungan Mr. J.B. Carasco selaku *Counselor* DFAT dan Mr. Daniel Hunt selaku *Deputy Program Director* AIPD pada tanggal 17 September 2014 untuk sinkronisasi Program yang akan dilakukan di UPT LPKD dengan komitmen AIPD terhadap peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pelayanan publik.

UPT-LPKD adalah lembaga yang memberikan pendampingan, pembekalan, pemahaman dan analisis tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur.

Agar tugas dan fungsinya berhasil dengan maksimal dalam mengatasi permasalahan dimaksud, UPT-LPKD melaksanakan strategi berupa 2 (dua) program yang dilaksanakan, yaitu :

1. **Perencanaan dan program**, meliputi perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang akurat, terbagi menjadi 3 (tiga) sub-program, yaitu :
  - a. Pembuatan *Database*, yang digunakan dalam basis analisis;
  - b. Analisis hasil kajian dengan menggunakan metode meta analisis ;
  - c. Analisis kajian baru. Poin b dan c digunakan sebagai *best practices* bahan perencanaan kebijakan dalam setiap daerah.
2. **Pengembangan Sumber Daya Manusia** pada masing-masing aparatur pengelola keuangan daerah melalui *training* dan *technical assistance* dalam *capacity building*. Hal ini dibagi menjadi 2 (dua) sub-program, yaitu :
  - a. Klinik; dan
  - b. *Training* (pelatihan) yang bertujuan dalam : (i) meningkatkan kemampuan teknis pengelolaan Keuangan Daerah; (ii) meningkatkan kemampuan perencanaan dan penganggaran; dan (iii)

meningkatkan kemampuan diseminasi pengelolaan keuangan daerah.

Dengan diimplementasikannya 2 (dua) program strategis tersebut, UPT-LPKD merupakan satu-satunya model solusi lembaga Pemerintah Daerah yang fokus pada *capacity building* dalam mengatasi permasalahan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu dengan melakukan :

1. Memberikan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pengevaluasian keuangan daerah ;
2. Melakukan *assessment competent* atau penilaian pemahaman Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pengevaluasian keuangan daerah ;
3. Pendampingan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan Pengelolaan Keuangan Daerah (*clinic center*) ;
4. Pengembangan Basis Data Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peningkatkan Pelayanan Teknologi Informasi Komunikasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.

File Pendukung : [Kerjasama\\_Laboratorium.JPG](#)

### **Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Manajemen Perubahan yang membedakan karakteristik *stakeholder* dalam 3 (tiga) kualifikasi yaitu : *Stakeholder* Kunci (*Key Stakeholder*), *Stakeholder* Utama (*Primer Stakeholder*) dan *Stakeholder* Pendukung (*Sekunder Stakeholder*) baik yang ada di internal maupun eksternal. Identifikasi *stakeholder* adalah sebagai berikut:

#### **1. Stakeholder Kunci**

Merupakan *Stakeholder* yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholder* yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya. *Stakeholder* Kunci adalah Kepala UPT *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah*.

#### **2. Stakeholder Utama (Primer).**

*Stakeholder* utama merupakan *Stakeholder* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. *Stakeholder* utama (primer) adalah Kasi Perencanaan dan Program, Kasi Peningkatan Kapasitas SDM dan Kasubag Tata Usaha.

#### **3. Stakeholder Pendukung (Sekunder).**

*Stakeholder* pendukung merupakan *Stakeholder* yang tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (*concern*) sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah, yaitu:



- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur terlibat dalam memberikan masukan terkait kebijakan pengembangan LPKD;
- b. Staf Unit Pelaksana Teknis *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah* ikut serta dalam pengembangan LPKD;
- c. Konsultan Teknologi Informasi yang terlibat dalam pembangunan pembelajaran elektronik yang berasal dari Universitas Gajah Mada;
- d. Akademisi yang terlibat dalam penyusunan Modul Pembelajaran terdiri dari Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Hasanuddin dan Universitas Sam Ratulangi;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Desa ikut serta mendukung pengembangan LPKD.
- f. Pihak Donor
  - *World Bank*, terlibat dalam pendampingan pengembangan LPKD;
  - *Australia Indonesia Partnership Decentralisation*, terlibat dalam pendampingan pengembangan LPKD;
  - *KOMPAK Governance for Growth* terlibat dalam pendampingan pengembangan LPKD.

**Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?**

Sumber Daya yang digunakan disini adalah dukungan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pihak Donor, Sumber Daya Pengajar (Tutor) yang memadai, serta dukungan dari tenaga teknis Pegawai UPT-LPKD.

**1. Sumber Daya Keuangan**

Pada Unit Pelaksana Teknis *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah* Kekuatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, terdapat 2 (dua) program kegiatan yaitu :

- a. (07) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (004) Kegiatan Fasilitasi *Laboratorium Keuangan Daerah*, hasil yang diharapkan adalah persentase kecukupan belanja operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor di UPT-LPKD Provinsi Jawa Timur dengan target anggaran sebesar Rp. 2.436.933.000,00 atau sebesar 20% dari hasil yang diharapkan yaitu berupa kecukupan belanja operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Tahun Anggaran 2015 selama 5 (lima) tahun perencanaan. Program kegiatan ini digunakan untuk belanja operasional pemeliharaan sarana prasarana Unit Pelaksana Teknis *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- b. (17) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (264) Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah* dengan target anggaran sebesar Rp. 5.491.478.350,00 dengan hasil yang diharapkan adalah meningkatnya Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memahami Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. **Keterlibatan Pihak Donor**
  - **Bank Dunia** terkait keterlibatan penyusunan modul Umum beserta aplikasi (*e-learning*) berbasis akrual diperuntukan untuk Peserta Pelatihan Teknis yang belum mengetahui Pengelolaan Keuangan Daerah secara utuh dengan sasaran utama adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

- **Australia Indonesia Partnership Decentralisation (AIPD)** terkait penyusunan modul *basic* diperuntukkan untuk Peserta Pelatihan Teknis yang baru menjabat sebagai Pengelola Keuangan Daerah dan modul *intermediate* diperuntukkan untuk Peserta Pelatihan Teknis yang sudah pernah menjabat sebagai Pengelola Keuangan Daerah serta melakukan pendampingan dalam penyaringan Tutor.

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Pengajar (Tutor) yang terdiri dari :

- a. Akademisi dari Perguruan Tinggi yang tergabung dalam *center* Pengelolaan Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan terkait keterlibatan sebagai tenaga ahli, praktisi.
- b. Tutor dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah mengikuti *training of trainer* (ToT).

## 3. Sumber Daya Teknis yang terdiri dari :

- a. 10 (sepuluh) orang Tenaga Teknis berlatar belakang Keuangan yang dikonsentrasikan pada Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Administrasi Penatausahaan Keuangan;
- b. 2 (dua) orang Tenaga Teknis berlatar belakang Pemerintahan yang dikonsentrasikan pada Perencanaan dan Program Kegiatan;
- c. 2 (dua) orang Tenaga Teknis berlatar belakang Teknologi Informatika yang dikonsentrasikan pada pengembangan Teknologi Informasi di Unit Pelaksana Teknis *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah*;
- d. 10 (sepuluh) orang Tenaga Keamanan yang bersertifikat;
- e. 6 (enam) orang Tenaga *cleaning service*;
- f. 4 (empat) orang Tenaga *outsourcing* mekanik, elektrik dan hidran.

## Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil?

Adapun pelaksanaan program kegiatan ini, telah memperoleh keluaran (*output*) yang dihasilkan dari Pengembangan UPT-LPKD dengan rincian penjelasan sebagai berikut: (data terlampir)

1. Pada tahun 2014 UPT-LPKD telah melaksanakan Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 6 (enam) kali, dengan tingkat kehadiran peserta sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) orang dari 244 (dua ratus empat puluh empat) orang atau sebesar 91% sedangkan Pada tahun 2015 melakukan pelatihan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, yang berasal dari SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Situbondo serta Tulungagung dengan tingkat kehadiran peserta sebanyak 807 (delapan ratus tujuh) orang dari 855 (delapan ratus lima puluh lima) orang atau sebesar 94,30%. Prosentase tingkat pemahaman dari tahun 2014 ke 2015 sebesar 9,9%, hal ini dapat dilihat dari hasil *pre-test* dan *post-test* peserta;
2. Menghasilkan Kajian-kajian Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijadikan sebagai rekomendasi pengambilan kebijakan umum APBD antara lain:
  - a. **Buku Analisis Standar Belanja (ASB);**
  - b. **Buku Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran** Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
  - c. **Klinik Konsultasi dari SKPD** baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun

Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 11 (sebelas) permasalahan

3. Terlaksananya proses pembelajaran dalam bentuk **kuliah-kuliah umum**, seperti yang dilakukan dengan UGM, UNDIP, UNS, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;(data terlampir)
4. UPT-LPKD memiliki 30 (tiga puluh) orang **Tutor Profesional** dan sudah sesuai dengan bidang ajarnya;
5. **Modul Berkualitas**, modul yang digunakan sudah mengacu pada Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual antara lain :
  - a. **Modul Umum** yaitu modul yang dibuat oleh Universitas Gajah Mada dengan pendanaan dari Bank Dunia;
  - b. **Modul yang dibuat dengan pendanaan dari AIPD**, modul ini sudah dibagi menjadi *modul basic* dan *modul intermediate*.
6. **Pelayanan Teknologi Informasi**, berupa *Blog* UPT-LPKD berisi tentang informasi mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. **Pelayanan Database**, berisi tentang data keuangan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kab/Kota, data pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah berupa Buletin/majalah dan Kajian, selain itu juga ada data hasil pelaksanaan pendampingan atau *clinic center*.

Berkaitan hasil keluaran (*output*) di atas, disampaikan **Contoh Konkrit** yang dapat dirasakan secara langsung adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran yang akurat utamanya bagi SKPD;
2. Penyampaian Surat Pertanggungjawaban tepat waktu;
3. Pengelola Keuangan mengerti tugas pokok dan fungsinya;
4. Mampu membedakan pemahaman Barang Milik Daerah;
5. Mengerti proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
6. Adanya kesepahaman Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku;
7. Peserta mampu memberikan solusi Permasalahan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bentuk *Transfer Knowledge*.

### **Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?**

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara menyeluruh secara tahunan dengan mengeluarkan :

1. **Evaluasi pelaksanaan Capacity Building** dengan memberikan *questioner*, untuk menilai Pelaksanaan, Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Konsumsi Pelatihan dan *Performance Tutor* serta Pelayanan Panitia pada Tahun Anggaran 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : (data terlampir)
  - a. Pelayanan panitia mendapatkan nilai tertinggi dengan rata-rata sebesar 87%, hal tersebut mencerminkan birokrasi pelayanan pada UPT-LPKD sudah berjalan dengan baik sesuai norma-norma pelayanan publik, sehingga para peserta merasakan pelayanan yang memuaskan. Meskipun pada kenyataannya hanya dengan 14 (empat belas) orang pegawai, UPT-LPKD mampu memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan, sehingga dapat dikatakan pelayanan yang ada telah berjalan secara efektif.
  - b. *Performance Tutor* selama 21 (dua puluh satu) kali pelatihan, Tutor dengan materi penatausahaan mempunyai nilai tertinggi dari materi yang lainnya, hal tersebut menunjukkan

bahwa materi penatausahaan merupakan materi yang paling diminati dan dibutuhkan pada Tahun Anggaran 2015.

2. **Evaluasi Kajian** ini menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan rekomendasi sebatas Perencanaan dan Penganggaran. Kedepan Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah yang dihasilkan dapat secara utuh dan digunakan sebagai rekomendasi pengambilan kebijakan.
3. **Evaluasi Penerapan Sistem Database Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi**, meliputi :
  - a. Melakukan rapat koordinasi berkelanjutan dengan *stakeholder* terkait;
  - b. Mengidentifikasi Kebutuhan dan Perencanaan Sistem *Database* dan Teknologi Informasi Komunikasi Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan kritik dan saran pengunjung;
  - c. Mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana yang ada;
  - d. Mengembangkan Sistem *Database* dan Teknologi Informasi Komunikasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. Mengevaluasi hasil data pengunjung secara periodik;
  - f. Mengevaluasi Implementasi Sistem *Database* dan Teknologi Informasi Komunikasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. **UPT-LPKD telah melakukan survey kepuasan** kepada seluruh SKPD Pemerintah Jawa Timur terkait Peningkatan Kualitas Pengelola Keuangan Daerah, berikut disampaikan 5 (lima) pendapat SKPD yang mewakili, yaitu :
  - a. Badan Penelitian dan Pengembangan : “Agar lebih profesional dalam menjalankan tupoksinya”
  - b. Biro Hukum : “Penting, sebagai dasar aplikatif dalam menjalankan tugasnya”
  - c. Rumah Sakit Paru Surabaya : “Untuk menjadi Pengelola Keuangan yang berkompeten bisa dilakukan melalui Pelatihan Teknis Keuangan”
  - d. Dinas Pertanian : “SDM bisa lebih memahami dan mengimplementasikan serta penyamaan persepsi terhadap ketentuan dan peraturan perundangan sebagai Pengelola Keuangan”
  - e. Biro Organisasi : “Pengelola Keuangan sifatnya teknis dan perlu pendidikan atau pelatihan khusus, tidak bisa dilakukan sembarang orang tanpa pemahaman terlebih dahulu”

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa pengembangan UPT-LPKD sangat berpengaruh terhadap Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dirasa perlu keberadaannya.

### **Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi?**

Berdasarkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) pada Unit Pelaksana Teknis *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah* terdapat beberapa hal yang merupakan faktor kendala, dimana unsur tersebut merupakan permasalahan/hambatan yang harus diatasi dan segera dilakukan penyelesaiannya oleh UPT-LPKD.

Keberadaan UPT-LPKD Provinsi Jawa Timur didukung penuh oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk ikut serta membantu program Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah di daerah untuk menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance/Government*). Guna memenuhi ekspektasi tersebut, UPT-LPKD melakukan koordinasi terkait penguatan kelembagaan dengan Kementerian Dalam Negeri dan melakukan penyempurnaan

terhadap bahan ajar, serta berusaha menyiapkan kebutuhan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh UPT-LPKD.

Dari kendala utama yang dihadapi di atas, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi **Kendala** beserta **Penyelesaiannya** yaitu :

1. **Kendala :**

Belum adanya Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan guna menunjang operasional Unit Pelaksana Teknis *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah*

**Penyelesaian :**

Menyusun draft Peraturan Gubernur tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan guna menunjang operasional Unit Pelaksana Teknis *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah* dengan didampingi pihak donor

2. **Kendala :**

Modul masih belum disesuaikan dengan karakteristik daerah Jawa Timur yang kompleks.

**Penyelesaian :**

Melakukan *upgrade* modul secara periodik agar sesuai dengan karakteristik daerah Jawa Timur dengan didampingi pihak donor

3. **Kendala :**

Penataan Sumber Daya Manusia yang belum merata baik secara kuantitas maupun keahlian

**Penyelesaian :**

Menyusun struktur organisasi dan rincian kerja (*job description*)

4. **Kendala :**

Kurang adanya keseragaman pemahaman tentang kebijakan serta sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

**Penyelesaian :**

Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) secara periodik terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

5. **Kendala :**

Masih minimnya jumlah ruangan yang digunakan untuk Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

**Penyelesaian :**

Menambah sarana dan prasarana yang menunjang Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

## Dampak dan Keberlanjutan

### Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini?

Mengingat *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah* Provinsi Jawa Timur merupakan inovasi baru dan lembaga pertama di Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah daerah, tentunya membutuhkan perencanaan strategis yang mampu menghantarkan LPKD Provinsi Jawa Timur menjadi lembaga yang dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut dapat dibuktikan dengan hasil Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan daerah berbasis akrual, berikut disampaikan bentuk testimoni dari beberapa peserta Pelatihan Teknis di UPT-LPKD (<https://www.youtube.com/watch?v=JUoYEvt31ME>):

**a. Ibu Diana Yatini** (Kabid Akuntansi dan Perbendaharaan dari DPPKAD Kabupaten Situbondo)

*"Tujuan kami untuk mengikuti pelatihan teknis di UPT-LPKD ini adalah untuk banyak melakukan diskusi dan praktek guna menyelesaikan kendala - kendala yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dengan harapan tersusunnya laporan keuangan berbasis akrual di Kabupaten Situbondo"*

**b. Bapak Peles Pigome** (Sekretaris Komisi V Bidang Kesehatan DPRD Provinsi Papua)

*"Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan di UPT-LPKD, telah memberikan wawasan serta pengetahuan baru tentang perencanaan yang berbasis masalah dan kinerja. Kami sangat salut Provinsi Jawa Timur telah memiliki laboratorium yang bisa menyimpan, menyajikan data lengkap sehingga perencanaan berbasis pembangunan dapat terukur dan dikembangkan secara nasional. Database disini sangat berguna, karena semua data tersimpan dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi gubernur selanjutnya, sehingga bisa dikatakan database pada LPKD ini sangat efektif dan luar biasa".*

**c. Ibu Yuli Nurhayati** (Staf Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur)

*"Sebelumnya saya tahu keuangan itu hanya penatausahaan (tentang keluar masuk uang) setelah mengikuti pelatihan teknis di LPKD ternyata keuangan itu dimulai dari perencanaan penatausahaan pelaporan dan pengawasan. Pelatihan disini juga menjelaskan Pelaporan Keuangan berbasis Akrual yang disajikan secara teknis dan detail, selain itu tutor yang ada disini berasal dari salah satu pelaksana di SKPD, cara menjelaskannya lebih enak dan mudah dimengerti, ketika ada permasalahan di SKPD kami, mereka dapat memberikan jawaban/solusi dengan lebih mudah. Saya sudah 2 (dua) kali mengikuti pelatihan teknis ini, sarana dan*

*prasarana sudah memadai”.*

UPT-LPKD secara garis besar bertujuan dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam percepatan pembangunan Jawa Timur, seperti yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019.

Adapun **manfaat** yang telah dihasilkan antara lain :

1. Meningkatnya prosentase SDM Provinsi Jawa Timur terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Terciptanya SDM Provinsi Jawa Timur yang profesional dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Meningkatnya kemampuan SDM Provinsi Jawa Timur dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD;
4. Meningkatnya pemahaman SDM Provinsi Jawa Timur terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Terciptanya persamaan persepsi terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Meningkatnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Terukurnya kemampuan SDM Provinsi Jawa Timur terhadap pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan hasil Pelatihan Teknis yang tersimpan dalam database UPT-LPKD;
8. Rekomendasi Kajian dijadikan pedoman pengambilan keputusan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilakukan secara online;
10. Database Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dijadikan sebagai pembelajaran secara elektronik dan mandiri;
11. Database Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan karya ilmiah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sedangkan **dampak yang dihasilkan** dalam Pengembangan UPT-LPKD, meliputi:

- a. Mewujudkan Provinsi Jawa Timur menuju tata kelola yang baik melalui ***“Ini Lo Pak De (Inovasi Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah)”***.
- b. Mewujudkan implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan realistis untuk meningkatkan mutu program dan kegiatan yang mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih baik.

Guna mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, taat pada Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat seperti yang diuraikan pada dampak diatas, maka dihasilkan **pengukuran dampak** sebagai berikut : ([uptlpkdjatim.blogspot.co.id](http://uptlpkdjatim.blogspot.co.id))

- a. Metode pembelajaran yang dilakukan menggunakan modul yang mudah dipahami oleh peserta Pelatihan Teknis, hal ini dapat dilihat dari adanya grafik peningkatan pemahaman peserta terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dari tiap – tiap angkatan;
- b. Rekomendasi Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah dijadikan tolok ukur anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengambil keputusan kebijakan anggaran;
- c. Meningkatnya pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah pada SDM Provinsi Jawa Timur,

- maupun masyarakat yang diukur dengan grafik pengunjung database tiap tahun;
- d. Meningkatnya Pemahaman SDM melalui Teknologi Informasi yang bisa langsung diakses oleh masyarakat terkait informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan konsultasi yang dilakukan secara online melalui blog UPT-LPKD.

### **Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi?**

**Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah** di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pembelajaran yang dapat dipetik adalah:

1. Mampu melakukan perencanaan dan penganggaran yang akurat;
2. Mampu menyampaikan Surat Pertanggungjawaban rampung tepat waktu;
3. Mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengelola Keuangan;
4. Mampu membedakan pemahaman tentang Barang Milik Daerah;
5. Mampu menyusun Laporan Keuangan dengan baik;
6. Adanya kesepahaman Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku;
7. Berkurangnya permasalahan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Bagi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, adalah :

1. Perencanaan penganggaran yang akurat, seimbang berdasarkan prinsip efektivitas efisiensi dan taat asas;
2. Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan;
3. Pengadaan Barang/jasa berjalan tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Terwujudnya Tertib Administrasi Aset sehingga dapat diketahui jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
5. Meminimalisir terjadinya kebocoran anggaran, dapat dilihat dari Lembar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Pengelola Keuangan

Proses pembelajaran yang diperoleh peserta dari kegiatan yang dilaksanakan pada UPT-LPKD adalah mendapatkan KEM (*Knowledge, Experience, and Motivation*) dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dan benar.

Adapun yang dimaksud dari KEM adalah sebagai berikut :

1. **Pengetahuan**, peserta mendapatkan pembelajaran secara langsung oleh para tutor yang berkompeten di bidangnya, pengetahuan tersebut disampaikan dengan menggunakan metode *e-learning* mulai dari perencanaan hingga pelaporan keuangan daerah;
2. **Pengalaman**, peserta banyak mendapatkan pembelajaran secara praktek terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga peserta dapat mengimplementasikan ilmunya di SKPD masing-masing;
3. **Motivasi**, peserta mendapatkan motivasi dari para Tutor terkait pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah di SKPD masing-masing, motivasi dilakukan agar pengelola keuangan tidak



jenuh, percaya diri serta dapat menumbuhkan kecintaan akan pekerjaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **Rekomendasi**

1. Dalam menghadapi tantangan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah yang semakin besar perlu didukung oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), antara lain : Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Media dan Masyarakat;
2. Keberadaan UPT-LPKD telah menjadi rujukan berbagai Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sejauh ini UPT-LPKD merupakan satu-satunya *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah* di Indonesia, sehingga dapat menjadi *pilot project* atau percontohan tingkat nasional bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan menjadi pionir *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah* di Indonesia, Pemerintah Daerah lain akan mendapatkan *multiplier effect* dari keberadaan Unit Pelaksana Teknis ini. Oleh karena itu peningkatan pemberdayaan unit ini dan pembentukan unit-unit serupa di Provinsi lain merupakan hal yang esensial;
3. Seiring akan dilakukannya penataan organisasi perangkat daerah, Unit Pelaksana Teknis *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah* mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendirikan *Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah* seperti UPT-LPKD di setiap provinsi di Indonesia sebagai garda utama percepatan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?**

Kedepan, harapannya UPT-LPKD ini mampu mencetak sumber daya manusia yang memahami pengelolaan keuangan daerah yang profesional. Adapun **Langkah - langkah keberlanjutan** yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Peraturan Gubernur terkait retribusi pelayanan Pendidikan LPKD;
2. LPKD merintis pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi pada Pemerintah Daerah yang akan mensertifikasi Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah yang diakui secara Nasional;
3. Untuk mendongkrak pemahaman para peserta pelatihan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan formulasi baru dengan melakukan :
  - a. Pemberian motivasi kepada para peserta Pelatihan Teknis dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai Pengelola Keuangan;
  - b. Memperbanyak kegiatan praktek sesuai dengan kegiatan pengelola keuangan sehari-hari;
  - c. Melakukan *upgrade* modul Pengelolaan Keuangan Daerah sampai dengan level teratas (*Advance*) sehingga timbul persamaan persepsi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan harapan kesenjangan pemahaman dapat diminimalisir;
  - d. Mendorong para tutor dalam menyampaikan materi supaya lebih kreatif, sehingga penyerapan ilmu Pengelolaan Keuangan Daerah dapat lebih efektif dan tidak membosankan.
4. Melakukan Pelayanan pendampingan (*Clinic Center*) melalui media Teknologi Informasi dan Komunikasi (*online*);
5. Melakukan diskusi isu-isu strategis yang dijadikan analisis hasil kajian baru sebagai

bahan rekomendasi untuk percepatan pembangunan Provinsi Jawa Timur di bidang ekonomi, sosial dan budaya;

6. Melakukan pengembangan *database* data Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat dipakai sebagai data pendukung pembuatan analisis kajian dan analisis kajian baru dan klinik konsultasi;
7. Melakukan pelayanan Teknologi Informasi Komunikasi terkait Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai sarana informasi publik dengan menambah fitur-fitur yang komunikatif sehingga dapat dimanfaatkan baik di dalam maupun luar negeri;
8. Menjalin Kerjasama dengan pihak donor secara berkelanjutan dalam rangka percepatan pengembangan UPT-LPKD;
9. Melakukan perluasan Gedung UPT-LPKD guna menambah sarana dan prasarana pembelajaran.

**Peluang Replikasi** yang dilakukan oleh UPT-LPKD adalah:(data terlampir)

1. Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis *e-learning*, diyakini telah merubah paradigma Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi lebih baik, sehingga menjadi fokus perhatian bagi daerah lain untuk dapat dikembangkan di daerahnya. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kunjungan kerja seperti:
  - a. Provinsi Sumatera Barat;
  - b. Provinsi Bengkulu;
  - c. Provinsi Kalimantan Utara;
  - d. Provinsi Kalimantan Timur;
  - e. Provinsi Jawa Barat;
  - f. Provinsi Jawa Tengah;
  - g. Provinsi Sulawesi Selatan;
  - h. Provinsi Maluku Utara;
  - i. Provinsi Papua Barat;
  - j. Provinsi Papua;
  - k. Kabupaten Pangkajene.
2. Metode Pembelajaran Pengelolaan Keuangan Daerah yang mudah dipahami dengan Tutor yang berkompeten baik dari akademisi serta praktisi, sehingga mendapat apresiasi dari Perguruan Tinggi dan Pihak Donor. Hal ini dapat dilihat dengan studi banding dan kunjungan kerja dari:
  - a. Universitas Gajah Mada;
  - b. Universitas Negeri Sebelas Maret;
  - c. Universitas Airlangga;
  - d. Universitas Trunojoyo;
  - e. Universitas Diponegoro;
  - f. Kunjungan Kerja Tim World Bank
  - g. Kunjungan Kerja Tim Australia Indonesia Partnership Decentralisation (AIPD);
  - h. Kunjungan Kerja Tim Departemen of Foreign Affair and Trade Australia (DFAT);
  - i. Kunjungan Kerja Tim KOMPAK Governance of Growth.

Dari beberapa kunjungan kerja dan studi banding di UPT-LPKD Provinsi Jawa Timur, *capacity building* yang dilakukan oleh UPT-LPKD ternyata mampu memberikan manfaat dan dapat dirasakan keberadaannya dalam upaya peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Agar prestasi ini dapat ditingkatkan dan dapat direplikasi daerah lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenalkan solusi pemecahannya dengan melalui ***“Ini Lo Pak De (Inovasi Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah)”***.

